

**KINERJA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI TANJUNG
KERASAK DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Firman Anggara

Manajemen Sumber Daya Aparatur, Manajemen Pemerintahan,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : odit.toboali@gmail.com

ABSTRACT

The Department of Youth and Sports Tourism, South Bangka Regency is a government agency that has the authority to manage affairs in the field of youth tourism and sports. The problems experienced in the development of Tanjung Kerasak beach tourism objects in South Bangka Regency are the lack of facilities and infrastructure, the decreasing number of tourists visiting, the lack of tourism promotion and the lack of quality human resources. So that the important role of DPKO is needed in order to create efforts and inhibiting factors in overcoming the problems that occur. The theory used in this study uses performance indicators from Agus Dwiyanto such as productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Based on the results of the author's analysis in government applied research research activities, the authors conclude that the performance of the South Bangka Regency DPKO is still not optimal. Only the productivity aspect has been running well, while other aspects such as service quality, responsiveness, responsibility, and accountability have not run optimally. There are several obstacles, namely the lack of response from the Youth and Sports Tourism Office, facilities and infrastructure, promotion, creative economy products, budget and cooperation with the community. The Department of Youth and Sports Tourism, South Bangka Regency takes an important role in overcoming various obstacles in submitting requests for additional budgets, inviting the public to participate, increasing the number of facilities and infrastructure, and increasing promotions, as well as improving the quality of creative economy products.

Keywords : Performance, Attraction, Development

ABSTRAK

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengurus urusan di bidang pariwisata kepemudaan dan olahraga. Permasalahan yang dialami dalam pengembangan objek wisata pantai Tanjung Kerasak di Kabupaten Bangka Selatan seperti minimnya sarana dan prasarana, menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung, kurangnya promosi pariwisata dan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia. Sehingga diperlukan peran penting DPKO agar dapat menciptakan upaya-upaya dan faktor-faktor penghambat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator kinerja dari Agus Dwiyanto seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil analisis penulis dalam kegiatan penelitian riset terapan pemerintahan, penulis menyimpulkan bahwa kinerja DPKO Kabupaten Bangka Selatan masih belum optimal. Hanya aspek produktivitas saja yang sudah berjalan dengan baik, sedangkan aspek lainnya seperti kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas belum berjalan dengan maksimal. Terdapat beberapa hambatan yaitu masih kurangnya respon dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, sarana dan prasarana, promosi, produk ekonomi kreatif, anggaran dan kerjasama terhadap masyarakat. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan mengambil peran penting dalam mengatasi berbagai hambatan mengajukan permohonan penambahan anggaran, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, menambah jumlah sarana dan prasarana, dan meningkatkan promosi, serta meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif.

Kata Kunci : Kinerja, Objek Wisata, Pengembangan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modernisasi intansi pemerintah diharuskan untuk bekerja lebih maksimal dan giat lagi. Semakin ketatnya persaingan di era sekarang menuntut intansi pemerintahan untuk mampu meningkatkan daya saing sehingga dapat tetap memberikan pelayanan terbaik dalam membuat kebijakan publik yang efisien, efektif, produktif dan dapat diimplementasikan. Di dalam lembaga pemerintah, terdapat beberapa orang terikat oleh hukum dan peraturan, dan harus dipatuhi orang-orang ini dalam menjalankan tugas formal mereka dengan semua dedikasi, kesadaran, dan tanggung jawab yang biasanya disebut pegawai.

Pariwisata merupakan industri jasa yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah juga menyadari bahwa industri pariwisata yang tangguh dapat membawa potensi perkembangan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menyatakan visinya untuk masa depan yang cerah dengan pembangunan paling menakjubkan di Indonesia menjadi taman wisata baru kelas dunia. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan asing juga mengalami peningkatan sebesar 19 persen Kawasan negara yang sudah mendapatkan izin masuk bebas visa. Hal itu selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Pasal 8 Ayat 4 Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARPROV) meliputi mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang industri pariwisata untuk mendukung pembangunan provinsi sebagai tujuan wisata nasional, dan mendukung provinsi untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai peningkat perekonomian utama daerah.

Dulu Kabupaten Bangka Selatan bergabung dengan Kabupaten Bangka sebelum dimekarkan pada tahun 2003, yang memiliki Wilayah seluas kurang lebih 360.708 hektar. Pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan pembangunan dalam menciptakan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang sejahtera, Salah satunya di bidang pembangunan pariwisata melalui Dinas Pairiwsata Kepemudaan dan Olahraga. Di Kabupaten Bangka Selatan Dinas Pariwisata digabungkan dengan

bidang kepemudaan dan olahraga dengan alasan karena memiliki tugas yang sama, seperti pemuda olahraga, juga berkaitan dengan pariwisata, sport tourism misalnya, dan hal-hal lain yang bisa di efisiensi.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sepanjang tahun 2018 sebanyak 618.000 orang wisatawan lokal maupun luar daerah yang datang berkunjung. Kunjungan wisatawan ke Bangka Selatan mengalami peningkatan satu hingga dua persen sedangkan pada tahun 2017 kunjungan wisatawan hanya mencapai 610.000 orang. Kemudian tahun 2019 jumlah wisatawan yang datang mengalami penurunan hanya mencapai 303.000 orang. Namun sejak tahun 2020 saat kasus pertama Covid-19 diumumkan mulai terjadi penurunan cukup drastis terhadap aktivitas wisata. Tercatat pada bulan juli 2020 angka kunjungan wisatawan hanya sebanyak 77.100 wisatawan saja.

Masyarakat mengharapkan pemerintah daerah setempat fokus mengembangkan sektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan baru. "Selama ini sektor pariwisata belum tergarap maksimal, bahkan banyak objek wisata tidak terurus," kata salah seorang warga Bangka Selatan, Rudi di Toboali, Kamis. Ia menyebutkan banyak objek wisata yang terbengkalai seperti Benteng dan juga Pantai Toboali. Kemudian wisata bawah laut dan objek wisata pantai lainnya yang dapat bersaing dengan objek wisata pada daerah lainnya."Banyak manfaat yang akan diperoleh masyarakat jika pariwisata dapat berkembang dengan baik, misalnya pengembangan usaha makanan khas, kerajinan, penginapan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan usaha lainnya," ujarnya. Menurut dia selama ini pemerintah daerah hanya fokus melakukan kegiatan seremonial yang tidak membawa efek ekonomi bagi masyarakat dan terkesan menghamburkan anggaran belum ada terobosan yang dilakukan pemda dalam mendukung sektor pariwisata sebagai sektor penunjang pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, padahal daerah ini memiliki potensi pariwisata yang besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan," ujarnya.

Hambatan kepariwisataan DPKO Kabupaten Bangka Selatan yaitu beberapa destinasi wisata masih minim fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan, keterbatasan penganggaran dibidang pariwisata menjadikan pengembangan sektor pariwisata berjalan ditempat, belum maksimalnya pembinaan SDM pariwisata sehingga masyarakat pariwisata mampu mandiri mengelola objek wisata disekitarnya sehingga memberikan manfaat baik bagi perekonomian masyarakat maupun perbaikan lingkungan, masih sulitnya pembebasan lahan serta belum adanya sertifikat tanah untuk pengembangan pariwisata.

Pengembangan wisata Pantai Tanjung Kerasak diperlukan suatu langkah ataupun program khusus yang isinya memberikan arahan dan pedoman pengembangan yang dapat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut. Untuk itu pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemegang kepentingan, sehingga dapat berperan secara terus menerus sebagai tema atau peserta dan penerima manfaat tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan tersebut instansi pemerintahan sangat memerlukan kinerja aparatur yang profesional dan baik dalam mengatasi hambatan serta berbagai permasalahan di sektor pariwisata.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Kerasak Di Kabupaten Bangka Selatan. sesuai dengan data yang harus di capai di LAKIP bahwa tahun 2019 jumlah wisatawan yang datang mengalami penurunan hanya mencapai 303.000 orang. Namun sejak tahun 2020 saat kasus pertama Covid-19 diumumkan mulai terjadi penurunan cukup drastis terhadap aktivitas wisata. Tercatat pada bulan juli 2020 angka kunjungan wisatawan hanya sebanyak 77.100 wisatawan saja.

Beberapa destinasi wisata masih minim fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan, keterbatasan penganggaran dibidang pariwisata menjadikan pengembangan sektor pariwisata berjalan ditempat, belum maksimalnya pembinaan SDM pariwisata sehingga masyarakat pariwisata mampu mandiri mengelola objek wisata disekitarnya sehingga memberikan manfaat baik bagi perekonomian masyarakat maupun perbaikan lingkungan, masih sulitnya pembebasan lahan serta belum adanya sertifikat tanah untuk pengembangan pariwisata. Selama ini pemerintah daerah hanya fokus melakukan kegiatan seremonial yang tidak membawa efek ekonomi bagi masyarakat dan terkesan menghamburkan anggaran belum ada terobosan yang dilakukan pemda dalam mendukung sektor pariwisata sebagai sektor penunjang pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, padahal daerah ini memiliki potensi pariwisata yang besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan objek Wisata Pantai Tanjung Kerasak maupun pengembangan daya tarik wisata. Penelitian Fajrin, Erwin & Imam yang berjudul *pemberian kinerja aparatur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning DI Kabupaten Bulungan* (Fajrin, Erwin, Imam, 2018), menemukan bahwa Kinerja aparatur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sudah cukup optimal, yang dapat diidentifikasi dari digunakannya internet untuk melakukan pelayanan maupun promosi objek wisata pantai Tanah Kuning agar bisa dikenal masyarakat secara luas. Penelitian Vergina mengemukakan bahwa tiga prioritas utama strategi alternatif pengelolaan Kawasan Tanjung Kerasak, yang pertama adalah pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada, kedua pembagian zona konservasi dan rehabilitasi untuk mengurangi dampak pencemaran serta menambah wawasan pengunjung, ketiga adalah pengembangan Kawasan wisata melalui peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan SDM (Vergina, 2010). Selanjutnya penelitian Imam mengemukakan bahwa kinerja dinas pada sektor pemasaran dan promosi

pariwisata namun tidak diimbangi dengan usaha membuat destinasi yang dipasarkan tersebut menjadi layak untuk dikunjungi oleh wisatawan, anggaran yang terbatas, usia pemerintah otonomi yang baru harus menjadi tuan rumah yang baik menjadi hambatan utama yang di hadapi (Imam,2015).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan objek wisata pantai tanjung kerasak, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian Vergina menggunakan analisis SWOT, dan penelitian Imam menggunakan analisis pengukuran kinerja oleh Christoper Pollit yaitu Relevance, Efisiensi, Efektivitas, dan Utility dan Sustainability. Sedangkan penulis sendiri menggunakan analisis teori dari Agus Dwiyanto (2008) yakni yang menyatakan bahwa kinerja dilihat dari 5 indikator yaitu : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Serta penelitian yang dilakukan penulis dilakukan saat pandemik Covid-19.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Kerasak Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif karena analisis data secara induktif adalah metode penelitian berdasarkan data maupun fakta yang dikumpulkan kemudian dapat menggambarkan permasalahan secara cermat karakteristik suatu masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Serta fokus pada pertanyaan dasar mendapatkan data dan menyampaikan fakta tanpa banyak detail yang tidak penting yang kemudian diselaraskan dengan fenomena dan pengaruhnya atau kesimpulan bersifat umum. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2017:107) mengatakan bahwa “Observasi merupakan alat penting untuk pengumpulan data (kualitatif). Teknik observasi ini digunakan melalui cara mengamati langsung objek yang bakal diamati kemudian direkam, dianalisis, dan disimpulkan”.

Sehingga kegiatan observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan yang berhubungan dengan permasalahan. Maka penulis menggunakan observasi partisipasi, dimana saat mengumpulkan data penulis menyatakan sedang melaksanakan kegiatan penelitian. Observasi dilakukan di lapangan terkait efektivitas pemberian tambahan penghasilan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Pembahasan

Menurut Basri dalam Sinambela (2012: 6) bahwa “Kinerja merupakan suatu tingkat keberhasilan seseorang atau sekelompok orang dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu dalam waktu yang telah ditentukan, yang memiliki beberapa kemungkinan seperti tujuan dan standar kerja, atau indikator yang telah ditetapkan”. Sedangkan menurut Amstrong dalam Wibowo (2014: 7) “Kinerja adalah hasil kerja yang terkait erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, dan perkembangan ekonomi”.

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang di suatu organisasi

secara maksimal sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar peraturan, dan sesuai dengan etika .

3.1 Produktivitas

Pada umumnya produktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan pemasukan (*input*) yang dibutuhkan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Produktivitas aparatur Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) diukur berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Suatu produktivitas dapat dikatakan baik dan akan tercapai jika Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Produktivitas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dapat di ukur dari penyelesaian tugas-tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab, hanya saja dikarenakan adanya covid-19 membuat pencapaian kinerja belum begitu maksimal, masih banyaknya program-program yang sebelumnya akan dilaksanakan terpaksa dibatalkan seperti pembangunan jembatan penyebrangan di pantai Tanjung Kerasak dan penyelenggaraan TCOF ditunda pelaksanaannya.

3.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan sangatlah penting dalam melihat kinerja suatu organisasi publik. Ada beberapa hal yang menjadi ukuran bagi suatu organisasi dalam mengukur kualitas layanan organisasinya. Secara umum yaitu ketepatan waktu dan alur pelayanan yang tepat dengan mekanisme yang telah ada. sehingga tingkat kepuasan layanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan kelompok terhadap kualitas layanan dapat dijadikan sebagai aspek bagi kinerja suatu organisasi publik.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, sarana dan prasarana juga dilihat sebagai penunjang hasil kualitas pelayanan yang diberikan, karena dalam kinerja

suatu organisasi publik dalam melayani masyarakat dan merespon kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan sehingga masyarakat akan merasa puas dan merasa terlayani dengan baik. Sehingga sarana dan prasarana yang baik maka akan menimbulkan kepuasan masyarakat yang baik pula.

Kualitas sarana dan prasarana dapat menjadikan pariwisata semakin baik sehingga dapat menarik pengunjung. Semakin berkembang dengan baik sarana dan prasarana di objek wisata, maka hasil kinerja DPKO dapat dinilai dari kualitas pelayanan yang sudah baik.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga masih belum memberikan pelayanan yang merata bagi masyarakat pengunjung tempat wisata. Bisa dilihat saat ini, yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dari tahun-tahun sebelumnya cenderung hanya fokus ke satu tempat wisata yang siap untuk dikembangkan.

3.3 Responsivitas

Kemampuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) untuk mengenali dan memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda-agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan berbagai program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menjunjung pada keselarasan antara program-program dan kegiatan pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dapat secara langsung menggambarkan kemampuannya dalam menjalankan misi dan tujuan DPKO.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu organisasi yang dimana tugasnya sebagai pelayanan publik yang selalu berusaha dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam urusan pariwisata. Aparatur DPKO Kabupaten Bangka Selatan dituntut untuk selalu siap terhadap keluhan-keluhan dan saran dari masyarakat bagi perkembangan pariwisata.

Aparatur Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) sebagai motor penggerak sektor pariwisata dalam hal ini harus bersikap lebih responsif lagi

terhadap sektor pariwisata yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang sebagian belum terlaksana secara optimal dalam memberikan sikap yang tanggap yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan pencapaian aspek responsivitas yang optimal.

3.4 Responsibilitas

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang ada. Kinerja dinas harus baik dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Pihak DPKO sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan prinsip yang telah ada, tetapi memang pada saat itu atas perintah Bupati untuk membangun objek wisata yang berada di pusat kota terlebih dahulu saja sehingga objek wisata yang lain seakan terabaikan.

Pelaksanaan kegiatan dan program belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai prosedur dan aturan yang berlaku sehingga dapat menunjukkan hasil yang belum maksimal. Aspek responsibilitas yang belum sungguh-sungguh dikelola dengan optimal. Khusus pelayanan diluar kantor DPKO Kabupaten Bangka Selatan belum menerapkan standar prosedur yang dapat dipahami oleh masyarakat.

3.5 Akuntabilitas

Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika dianggap sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, yang dimana para pejabat tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.

kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan yang dilihat dari aspek akuntabilitas belum sungguh-sungguh dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena DPKO belum memahami pelaksanaan tugas yang

dibebankan kepada mereka, sudah ada yang terlaksana dengan baik tetapi hanya di beberapa wisata sehingga di wisata yang lain masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga belum bisa memberikan hasil yang baik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan ketika sedang berlangsungnya pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Selatan, berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana dilaksanakan sebelum adanya wabah Covid-19. Namun permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terkait pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Kerasak di Kabupaten Bangka Selatan.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan objek wisata sudah cukup baik seperti aspek produktivitas karena sudah mencapai output dan input yang sudah ditargetkan bahkan lebih walaupun sempat terkendala dengan adanya covid-19, namun masih terdapat yang belum dilaksanakan secara maksimal dilihat pada aspek kualitas layanan, aspek responsivitas aspek tanggung jawab dan aspek akuntabilitas,
2. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Kerasak terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan pengembangan Pantai Tanjung Kerasak menjadi terhambat, diantaranya: Sarana dan Prasarana, Respon Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Proses Birokrasi, Kerjasama, dan Produk Ekonomi Kreatif.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam mengatasi hambatan pada pengembangan daya tarik wisata, yaitu:
 - a) Meningkatkan proses birokrasi yang lebih fleksibel namun sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga koordinasi antar Dinas terkait dapat berjalan secara efektif, efisien dan fleksibel;
 - b) Mengadakan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata seperti mengadakan pameran, mengadakan pelestarian penyu bersama masyarakat, dan lain sebagainya;
 - c) Menambah jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung objek wisata;
 - d) Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif dengan memberikan pembinaan dan pelatihan khusus bagi masyarakat sehingga dapat mengembangkan ide-ide ekonomi yang lebih kreatif.

4.2 Saran

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan, maka penulis memberikan beberapa saran atau masukan berdasarkan analisis dan hasil penelitian, yaitu:

1. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga diharapkan lebih selektif dalam memilih sumber daya manusia di lingkungan Dinas. Peningkatan kualitas aparatur DPKO untuk lebih memahami dan menguasai mengenai pariwisata dengan melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur. Aparatur DPKO diharapkan lebih memperhatikan lagi dari segi aspek kualitas layanan, aspek responsivitas, aspek responsibilitas, dan aspek akuntabilitas sehingga pelayanan terhadap diberikan secara maksimal dalam pengembangan wisata.
2. Dalam mengatasi hambatan, DPKO Kabupaten Bangka Selatan diharapkan perlu memperbaiki, pengelolaan, perawatan objek wisata dan pengembangan sarana dan prasarana yang dimiliki Kabupaten Bangka Selatan agar menjadi lebih baik. Perbaikan dalam sistem birokrasi juga diperlukan agar memudahkan proses perencanaan dan penganggaran. DPKO juga harus lebih intens dalam melaksanakan koordinasi antar dinas yang terkait dalam rangka melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasana di beberapa objek wisata.
3. Untuk upaya dari hambatan sendiri perlu perbaikan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan cara lebih melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata dan meningkatkan antusiasme masyarakat dan memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta, melalui pengadaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pariwisata yang melibatkan pihak swasta. Memperbaiki koordinasi dengan para pegiat dan pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Ridwan, M., & Aini, W. 2019. *Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata*. Deepublish.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Sukarsa, I Made. 1999. *Pengantar Pariwisata*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia Timur (BKS-PTN-INTIM)
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja* (Edisi ke-4). Jakarta: Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025.

C . Sumber Lainnya

- Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan